

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN PRIBADI SEBAGAI
KENDARAAN UMUM**



DISUSUN OLEH :

PRIYO ANJAR KUSUMO
NIM : 02112099

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

| Isi | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB : | |
| 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah..... | 1 |
| 1.2 Penjelasan Judul | 1 |
| 1.3 Alasan Pemilihan Judul..... | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.6 Metode Penelitian | 12 |
| 1.6.1 Pendekatan Masalah..... | 12 |
| 1.6.2 Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 1.6.4 Analisis Bahan Hukum..... | 14 |
| 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika | 13 |
| II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UMUM DENGAN MOBIL PRIBADI..... | 15 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.1 | Pengertian Konsumen Pengguna Jasa Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum (Taksi Tanpa Ijin) | 17 |
| 2.2 | Hak – Hak Konsumen Pengguna Jasa Kendaraan Umum (Taksi Tanpa Ijin) | 22 |
| 2.3 | Kewajiban Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Sebagai Angk.utan Umum (Taksi Tanpa Ijin) | 29 |
| III UPAYA HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI YANG DIRUGIKAN OLEH PENYEDIA JASA TAKSI GELAP | | |
| 3.1 | Akibat Hukum Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Umum Tanpa Ijin..... | 38 |
| 3.2 | Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Sebagai Transportasi Umum Tanpa Ijin..... | 44 |
| 3.3 | Upaya Hukum Konsumen Pengguna Transportasi Umum Tanpa Ijin Yang Merugikan..... | 49 |
| IV PENUTUP | | |
| 4.1 | Kesimpulan | 57 |
| 4.2 | Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pengguna angkutan umum dengan kendaraan pribadi menjadi suatu permasalahan hukum yang sering terjadi saat ini. Para pengguna jasa angkutan umum dengan kendaraan bermotor roda empat pribadi sebenarnya kurang mengerti akan hak – hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam kegiatan transportasi. Pelaku usaha transportasi umum dengan kendaraan bermotor roda empat ini juga banyak sekali melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya mengenai perlindungan hukum bagi para pengguna jasa yang mereka layani. Serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi para pengguna jasa transportasi umum dengan kendaraan bermotor roda empat pribadi dapat diperoleh disaat mereka merasa dirugikan oleh para pelaku usaha transportasi tersebut. Dan apa saja yang menjadi sanksi bagi para pelaku usaha transportasi tersebut apabila mereka melanggar. Sehingga para pengguna jasa transportasi tersebut merasa terlindungi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Legal protection for public transport users with private vehicles into a legal issues often occurred during this. The users public transport service with motor vehicles four - wheeled personal do not really understand the – right they should get in transport activities. Bussines players public transportation with motor vehicles four - wheeled is also a lot of down. One concerns legal protection for the users who they touch. And how effort to protect legal for the users of public transportation with motor vehicles four – wheeled personal can be obtained when they are wronged by entrepreneurs the transportation. And whatever sanction to business players the transportation if they broke the. So that the users the transportation feel are protect in accordance with legislative regulation in effect in Indonesia,



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Transportasi umum hendaknya lebih diperhatikan oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Indonesia terkait dengan pendistribusian angkutan umum secara baik dan benar sesuai dengan Undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Taksi tanpa ijin sudah banyak merugikan pengguna dan penyedia jasa angkutan umum sehingga saya berharap pemerintah memberi sanksi yang tegas sehingga pengguna jasa transportasi umum dapat memperoleh hak sebagai konsumen secara utuh. Adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Para pengguna jasa transportasi umum dengan menggunakan kendaraan pribadi (taksi tanpa ijin) mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 124 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa angkutan umum. Serta pasal 3 UULLAJ yang menjelaskan mengenai tata tertib lalu lintas., dari sini juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum sesuai dengan pasal 140 KUHD yang dimana para pelaku usaha memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan, mencemarkan pengguna jasa

2. Upaya hukum bagi para pengguna jasa transportasi umum dengan menggunakan kendaraan pribadi (taksi tanpa ijin) yang merasa dirugikan oleh penyedia jasa transportasi taksi tanpa ijin. Diatur dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen yang sedang terjadi. Pasal 48 UUPK juga menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen mengacu kepada ketentuan peradilan umum. Sehingga menurut pasal 1865 KUHPdata menjelaskan dimana seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa , dalam hal ini adalah wanprestasi yang melanggar hukum. Serta SK

Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menjelaskan mengenai tugas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga dapat diputuskan (vonis) yang berkekuatan hukum tetap, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK.

4.2 Saran

Dari beberapa analisa yang telah saya lakukan terkait dengan skripsi saya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Menurut Undang – Undang No 22 Tahun 2009 diantaranya :

1. Perlindungan hukum untuk pengguna jasa transportasi umum dengan menggunakan kendaraan pribadi (taksi tanpa ijin) memang ada dalam peraturan perundang – undangan. Akan tetapi kita sebagai pengguna jasa transportasi juga harus berhati – hati supaya tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan pihak lain.
2. Upaya Hukum bagi pengguna jasa transportasi kadang sangat minim diketahui oleh pengguna jasa sehingga banyak terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi umum. UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan konsumen. Serta SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menjelaskan tentang tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana setiap konsumen yang dirugikan barang dan/ata jasa oleh pelaku usaha. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan BPSK maka pihak yang tidak menerima dapat melanjutkan di Pengadilan Negeri sebagai permohonan keberatan dan mengacu Peraturan Mahkamah Agung MA Nomor 01 Tahun 2006 salah satu

pihak dapat mengajukan kasasi setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri. Sebelum melakukan upaya hukum setidaknya konsumen juga harus mengetahui lokasi, dan siapa nantinya yang akan di gugat dalam proses hukum yang berlaku. Maka dari itu lebih baik menggunakan infrastruktur yang sudah disediakan pemerintah Indonesia. Selain menjaga stabilitas juga akan membantu perekonomian Negara Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATURE

- Basri, Hasnil. 2002. *Hukum Pengangkutan*. Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU
- C.S.T,Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Martolusuma,Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad,Abdulkadir. 1998. *HukumPengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kamaludin, Rustika. 1987. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pot,Van Der. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis ar-Ruzz*. Jogjakarta: Media
- Purba, Hasim. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan: Pusaka Bangsa
- Purwosutjipto, H.M.N. 2008 *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan
- Soekanto,Soejono dan Srimamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Spelt,N.M dan J.B.J.M Berger. 1993. *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Surabaya: Yuridika

2. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan : KM 35 Tahun 2003 tentang Angkutan Orang Di
Jalan Dengan Menggunakan Kendaraan Umum

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Surat Keputusan Memperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 Tugas Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung MA 01 Tahun 2006 tentang Pengajuan Keberatan Atas
Putusan BPSK

Permen No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan
Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek

3. LAIN – LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_konsumen

www.sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.Pdf

<https://www.tempo.co/topik/masalah/1819/taksi-gelap>

www.cnnindonesia.com/ekonomi/ap-ii-sebut-taksi-gelap-sudah-menjadi-angkutan-resmi-bandara/